

# INDUSTRI & PERDAGANGAN

## TCTP Kembangkan Kawasan Industri Terintegrasi

### NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sepakat membuat terobosan baru untuk mengakselerasi realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara melalui skema kerja sama *Two Countries, Twin Parks* (TCTP). Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan *Joint Working Committee* TCTP ke-3 yang berlangsung di Jakarta.

Melalui TCTP, kedua negara berkomitmen untuk mengembangkan kawasan industri terintegrasi yang saling melengkapi, memperkuat keterhubungan rantai pasok, serta memfasilitasi alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kerja sama TCTP ini merupakan langkah pragmatis untuk mengimplementasikan konsensus kedua kepala negara dalam mendorong peningkatan investasi, perdagangan, dan sinergi industri.

“Yang terpenting fokus pada implementasi dan pelaksanaan nyata dari perjanjian investasi yang telah disepakati agar memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian dan Ekonomi Digital Kemenko Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa salah satu terobosan utama dalam pertemuan ini adalah kesepakatan untuk mempercepat pembentukan usahapadangan atau *Joint Venture* sebagai fondasi bisnis yang kokoh. Fokus utama saat ini adalah merampungkan kerja sama strategis antara Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan raksasa konstruksi dan investasi global, *China State Construction Engineering* (CSCEC).

“Skema *Joint Venture* ini bukan sekadar investasi modal, tetapi diarahkan untuk memastikan terjadinya alih teknologi, penguatan tata kelola kawasan berstandar internasional, serta peningkatan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia,” ungkap Ali.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia juga secara resmi mengusulkan perluasan cakupan kerja sama dengan memasukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Masuknya Tanjung Lesung diharapkan dapat mendiversifikasi portofolio investasi TCTP, membuka peluang baru di sektor pariwisata, serta pengembangan kawasan industri kreatif dan pengolahan berbasis maritim.

“Optimisme dan semangat besar mewarnai masa depan kerja sama Indonesia dan China melalui TCTP. Di tengah dinamika ekonomi global, kolaborasi yang dilandasi saling percaya, saling melengkapi, dan saling menguntungkan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ali.

Disisi lain, Pemerintah RRT melaporkan bahwa skema TCTP telah menunjukkan hasil nyata. Hingga saat ini, tercatat 18 proyek investasi dua arah dengan nilai total lebih dari RM-B32,8 miliar.

Indikator keberhasilan lainnya terlihat dari masuknya produk unggulan Indonesia, seperti kelapa segar dan durian beku, ke pasar Tiongkok melalui pelabuhan Fuzhou, serta beroperasinya proyek tekstil Honggang.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Fujian, RRT juga menyoroti bahwa nilai perdagangan Fujian-Indonesia terus tumbuh positif dalam tiga tahun terakhir, dan menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar Fujian di ASEAN.

Untuk menyeimbangkan neraca investasi, Wakil Direktur Jenderal Departemen Perdagangan Provinsi Fujian, Hang Dong, memberikan tawaran khusus bagi dunia usaha Indonesia untuk mendirikan kantor pusat regional di Kawasan Industri China. ● gfo



**PRODUKSI GERABAH** : Perajin menyelesaikan pembuatan tungku berbahan tanah liat di sentra kerajinan gerabah Desa Kundsari, Kedu, Temanggung, Sabtu (7/2/2026). Menurut perajin, curah hujan tinggi mengakibatkan produksi gerabah menurun hingga 60 persen dibanding saat musim kemarau yaitu dari 500 buah per bulan menjadi hanya 200 buah per bulan karena proses pengeringan yang memakan waktu lama.

## Hilirisasi Ayam Terintegrasi Masuki Tahap Pertama

Paser - Pemerintah mulai merealisasikan Program Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi sebagai langkah strategis memperkuat swasembada protein hewani, menekan disparitas harga telur dan daging ayam antar-wilayah, serta mendukung Program Makan Bergizi (MBG).

### NERACA

Program ini mengintegrasikan seluruh rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir agar pasokan lebih stabil dan produksi lebih merata di berbagai daerah.

Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, program tersebut ditandai dengan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi Tahap I yang dilaksanakan di perkebunan Pandawa Afd 2, lahan PTPN III Regional V, Desa Suatung, Kecamatan Pasir Belengkong. Kegiatan ini menjadi tonggak awal pembangunan fasilitas farm Parent Stock (PS) Layer dan Hatchery.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, Joko Bowono, menyampaikan bahwa tahap awal pembangunan me-

manfaat lahan seluas 10 hektare melalui kerja sama dengan PTPN. Fasilitas PS ayam petelur yang dibangun memiliki kapasitas minimal 100.000 ekor per siklus produksi.

“Hari ini kita lakukan groundbreaking parent stock. Ke depan, jika berkembang menjadi kawasan terintegrasi, kami siap memperluas lahan hingga 100 hektare,” ujar Joko.

Joko menjelaskan, pembangunan PS menjadi fondasi utama dalam mewujudkan industri ayam terintegrasi karena menentukan ketersediaan bibit secara berkelanjutan.

Dengan bibit yang terjamin, rantai produksi telur dan daging ayam di tingkat hilir dapat berjalan lebih efisien dan tidak bergantung padapasokan dari luar daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wi-

jaya, menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap hilirisasi ayam petelur dapat menekan angka inflasi serta memenuhi kebutuhan telur lokal secara mandiri.

“Program ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan memperkuat posisi Paser sebagai penyanga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN),” ungkap Katsul.

Groundbreaking di Kalimantan Timur dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan; Sekretaris Daerah Kabupaten Paser; Direktur Utama PTPN III beserta jajaran direksi; unsur Forkopimda Kabupaten Paser; perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Timur; Direktur Perumda Prima Jaya Taka Kabupaten Paser; serta Ketua Forum UMKM Kabupaten Paser.

Pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi melibatkan Kementerian Pertanian, BUMN pangan, pemerintah daerah, perbankan, koperasi, UMKM, serta peternak rakyat melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO). Program ini

direncanakan berjalan di 30 provinsi dalam dua tahap dengan total pembangunan 323 unit prasarana industri peternakan.

Sebagai tahap awal, pemerintah melaksanakan groundbreaking di enam titik yang ditetapkan sebagai fase pertama pengembangan, yakni Jawa Timur (Malang), Sulawesi Selatan (Bone), Gorontalo (Gorontalo Utara), Kalimantan Timur (Paser), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa), dan Lampung (Lampung Selatan).

Adapun untuk Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2026 direncanakan pembangunan 14 unit fasilitas hilirisasi. Lokasi pertama berada di Kebun Pandawa PTPN III Regional V seluas 99 hektare untuk pembangunan PS Farm Layer dan Hatchery dengan kapasitas 14 kandang masing-masing 10.000 ekor atau total 140.000 ekor, dengan target produksi DOC (Day Old Chick) mencapai 10 juta ekor per tahun. Lokasi kedua di Kecamatan Karangan, Kota Balikpapan, akan dibangun pabrik pakan berkapasitas 120.000 ton per tahun, sedangkan

lokasi ketiga di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, disiapkan untuk fasilitas FS Farm Pullet dengan total populasi 480.000 ekor.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa hilirisasi ayam terintegrasi bukan sekadar pembangunan kandang, melainkan penguatan ekosistem perunggasan nasional dari hulu hingga hilir.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” jelas Agung.

Agung menambahkan, ekosistem yang dibangun mencakup pembibitan ayam, pakan berbasis bahan baku dalam negeri, kesehatan hewan, rumah potong unggas, cold chain, pengolahan, logistik, hingga pemasaran.

Melalui ekosistem terintegrasi tersebut, pemerintah menargetkan produksi telur dan daging ayam tersebar lebih merata di berbagai daerah. ● gfo

## Industri Sawit Dukung Biodiesel untuk Ketahanan Energi

### NERACA

Depok - Program biodiesel berbasis sawit terus menunjukkan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional sekaligus perekonomian Indonesia. Sejak dijalankan secara bertahap lebih dari dua dekade terakhir, konsumsi biodiesel melonjak signifikan, menghasilkan penghematan devisa ratusan triliun rupiah serta menekan emisi karbon.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Fadhil Hasan, menegaskan biodiesel kini menjadi bagian penting kebijakan energi lintas sektor. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai pengganti aturan

lama. Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan turunnnya produksi minyak, meningkatnya energi yang terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujar Fadhil.

Sepanjang tahun lalu, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Capaian tersebut dinilai memberikan kontribusi langsung terhadap indeks ketahanan energi nasional.

Program campuran saat ini masih bertahan di

B40 sepanjang 2026, sementara implementasi B50 masih menunggu kepastian pasokan dan hasil uji teknis.

“Kita ingin transisi berjalan bertahap, agar supply dan industri siap. Target akhirnya jelas, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi,” kata Fadhil.

Dari sisi teknis, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM Herbert Wibert Victor menjelaskan bahwa biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal sebelum disalurkan ke SPBU dan industri.

Adapun untuk 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter. ● gfo

## Pengawasan Berbasis Risiko Diperkuat

### NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat sistem pengawasan intern yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pencegahan.

Kolaborasi tersebut tertuang dalam penandatanganan dokumen kerja sama pada acara Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2026 di Kantor KKP, Jakarta.

“Saya kira peran strategis Kejaksaan Agung dan BPKP ini akan semakin memperkuat pengawasan oleh Ijten, mengingat tugas KKP semakin tinggi, diantaranya pembangunan lanjutan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih, rencana pembangunan 1500 lebil kapal perikanan dan revital-

isasi kawasan tambak panta seluas 20.000 hektar, disamping berbagai program prioritas lainnya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Rakerwas.

Rakerwas Ijten KKP Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan sinergi pengawasan lintas institusi. Pengawasan intern diarahkan tidak hanya pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada pengendalian risiko sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Pendekatan ini bertujuan memastikan akuntabilitas, efektivitas pengawasan anggaran, serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, khususnya pada area strategis dan berisiko tinggi. KKP saat ini menjalankan sejumlah pro-

gram strategis, diantaranya Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya tematik berbasis bioflok, Kawasan Industri Garam Nasional (K-SIGN), pembangunan 1500 kapal perikanan, hingga pembangunan budidaya udang skala besar di Waingapu.

“Pengawasan intern harus hadir sejak awal sebagai mitra strategis manajemen, bukan semata di akhir sebagai pemeriksa. Sinergi dengan Kejaksaan RI dan BPKP kami posisikan sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian risiko, agar program strategis dan pengadaan dapat berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ijten KKP, Ade Tajudin Sutiawarman.

Perjanjian kerja sama antara KKP, Kejaksaan Agung, dan BPKP meliputi banyak aspek.

Perjanjian Kerja Sama

antara Ijten KKP dengan Jaks Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia misalnya, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta bentuk dukungan hukum lain yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern.

Kemudian dengan Jaks Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia meliputi pengamanan pembangunan yang bersifat strategis, pengamanan investasi dan berbagai paksi data dan/atau informasi yang terkait.

Sedangkan kerja sama Ijten dengan BPKP, dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pa-

nguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP.

Meliputi pengawasan atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan di lingkungan KKP, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Ijten KKP, penguatan tata kelola manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan KKP, dan berbagai paksi data dan/atau informasi dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan dan peningkatan kualitas tata kelola.

Lebih lanjut, KKP juga menyiapkan empat regulasi untuk memperkuat sektor hilir kelautan dan perikanan, yang saat ini masih dalam tahapan rancangan. KKP menargetkan empat regulasi ini selesai di tahun 2026. ● gfo

**PENGUMUMAN**

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham dalam Perseroan Terbatas PT KESHAGE JAYA SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”), pengambilalihan mana dilakukan langsung dari pemegang saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan, maka dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa seluruh saham dalam Perseroan milik PT JASOLA GADING, berkedudukan di Jakarta Utara, akan dialihkan kepada pihak lain.

Bagi pihak-pihak yang keberatan atas pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan melalui Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 9 Februari 2026  
Direksi  
PT KESHAGE JAYA SEJAHTERA

**PENGUMUMAN**

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham dalam Perseroan Terbatas PT INHARLIA JAYA ABADI, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”), pengambilalihan mana dilakukan langsung dari pemegang saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan, maka dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa seluruh saham dalam Perseroan milik PT JASOLA GADING, berkedudukan di Jakarta Utara, akan dialihkan kepada pihak lain.

Bagi pihak-pihak yang keberatan atas pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan melalui Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 9 Februari 2026  
Direksi  
PT INHARLIA JAYA ABADI

**PENGUMUMAN**

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham dalam Perseroan Terbatas PT INDEA REJEKI JAYA, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”), pengambilalihan mana dilakukan langsung dari pemegang saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan, maka dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa seluruh saham dalam Perseroan milik PT JASOLA GADING, berkedudukan di Jakarta Utara, akan dialihkan kepada pihak lain.

Bagi pihak-pihak yang keberatan atas pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan melalui Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 9 Februari 2026  
Direksi  
PT INDEA REJEKI JAYA

**Manulife Investments**

**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), selaku Manajer Investasi, dengan ini memberitahukan rencana perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II (MONI II) terkait hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan MONI II, antara lain:
  - Perubahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan dalam MONI II, sebagai berikut:
 

Ketentuan Awal	Ketentuan Baru
Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar) Unit Penyertaan...	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar <b>46.000.000.000 (empat puluh enam miliar)</b> Unit Penyertaan...
- Perubahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan pada beberapa Kelas Unit Penyertaan MONI II, sebagai berikut:
 

Kelas Unit Penyertaan MONI II	Ketentuan Awal	Ketentuan Baru
- MONI II Kelas A		
- MONI II Kelas Income 1	...secara terus menerus sampai dengan jumlah 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.	...secara terus menerus sampai dengan jumlah <b>7.000.000.000 (tujuh miliar)</b> Unit Penyertaan.
- MONI II Kelas Income 2		
- MONI II Kelas Income 1		
- MONI II Kelas Income 2		
- MONI II Kelas Income 1		
- MONI II Kelas Income 2		

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan MONI II serta pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Customer Service MAMI di (021) 25552255.

Jakarta, 9 Februari 2026  
Manajer Investasi  
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**PANGGLIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS/LB) PT QUALITY INDONESIA**

Dengan ini, Direksi PT. QUALITY INDONESIA (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB), yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Meeting Komplek Dutamas Fatmawati Blok A1 No. 30-32 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Agenda : Hasil Akhir Likuidasi, Pembagian Aset dan Pembebasan Tugas Likuidator

Catatan :  
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.  
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS/LB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) Perseroan.  
3. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.  
4. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir tepat waktu selambat-lambatnya 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 9 Februari 2026  
PT QUALITY INDONESIA  
Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN**

Direksi PT SINO INDO PASIFIK GRUP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa SIP SNACK INTERNATIONAL PTE. LTD, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, akan melakukan pengambilalihan saham-saham (“Akuisisi”) Perseroan yang menjadi hak dan milik dari mynya CHINDY YUANITA LUTTERS, sebanyak 495 saham, dan atas Akuisisi tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan melalui Kantor Perseroan yang beralamat pada Gedung Grand Silipt Tower Lantai 42 Unit G-H, Jalan Letjen S. Parman, Kavelling 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11480.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 9 Februari 2026  
Direksi  
PT SINO INDO PASIFIK GRUP

**PENGUMUMAN**

Direksi PT Usaha Makmur Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa telah dilakukan pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan sebagaimana disetujui oleh para pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 20 Januari 2026 yang telah dinyatakan kembali dalam Akta No. 125 tanggal 23 Januari 2026, dibuat di hadapan Jimmy Tinal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitaannya oleh Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Penetapan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09.0024615 tanggal 2 Februari 2026.

Pengumuman ini dibuat dan diterbitkan untuk memenuhi Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Jakarta, 9 Februari 2026  
Direksi  
PT Usaha Makmur Internasional